



PEMUFAKATAN PERHIMPUNAN POLITIK KEBANGSAAN INDONESIA SEBAGAI WADAH PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1927-1935

AGREEMENT ON THE INDONESIAN NATIONAL POLITICAL ASSOCIATION AS A VESSEL FOR THE NATIONAL MOVEMENT IN 1927-1935

Tafrikhatul Amalia¹, Putri Melani², Asri Rahma Dini³, Naila Nurrohmah⁴, Maftuh Ajmain⁵

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: tafriamalia21@gmail.com¹, putrimelani329@gmail.com², rahmadini.asri@gmail.com³,
nailanurrohmah07@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 17-05-2025

Revised : 19-05-2025

Accepted : 21-05-2025

Published : 23-05-2025

Abstract

The Indonesian National Political Association (PPPKI) was a forum for the unity of political organizations in Indonesia during the national movement which was formed in 1927. PPPKI aimed to unite various organizations that had a vision of fighting for independence, such as the Indonesian National Party (PNI), Budi Utomo, and Sarekat Islam, in order to strengthen efforts to fight against Dutch colonialism. This organization became a means of coordination in harmonizing national struggle strategies, including in the political, economic, and social fields. Despite facing various challenges, such as differences in ideology and pressure from the colonial government, PPPKI succeeded in showing the importance of cooperation between organizations in the national movement. The existence of PPPKI became the initial milestone in the formation of a more organized national awareness, which then led to more concrete efforts towards Indonesian independence.

Keywords: *Consensus, Political Association, Nationalism*

Abstrak

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) merupakan wadah persatuan organisasi politik di Indonesia pada masa pergerakan nasional yang dibentuk pada tahun 1927. PPPKI bertujuan untuk menyatukan berbagai organisasi yang memiliki visi perjuangan kemerdekaan, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Budi Utomo, dan Sarekat Islam, guna memperkuat upaya melawan kolonialisme Belanda. Organisasi ini menjadi sarana koordinasi dalam mengharmonisasikan strategi perjuangan nasional, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan ideologi dan tekanan dari pemerintah kolonial, PPPKI berhasil menunjukkan pentingnya kerja sama antarorganisasi dalam pergerakan kebangsaan. Keberadaan PPPKI menjadi tonggak awal pembentukan kesadaran nasional yang lebih terorganisir, yang kemudian mengarah pada upaya-upaya yang lebih konkret menuju kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: *Pemufakatan, Perhimpunan Politik, Nasionalisme*

PENDAHULUAN

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia merupakan suatu langkah penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dalam perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan, peran perhimpunan politik sangat krusial sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat. Berbagai perhimpunan politik yang muncul selama masa penjajahan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia, memainkan



peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasional serta menggalang kekuatan untuk mencapai kemerdekaan.

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia merupakan suatu langkah penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia adalah suatu langkah strategis yang sangat penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia terbelah dalam berbagai organisasi pergerakan yang masing-masing memiliki tujuan dan visi yang berbeda, baik dari segi ideologi, etnis, maupun daerah. Meskipun demikian, semangat nasionalisme yang terus berkembang sejak awal abad ke-20 menyadarkan berbagai elemen masyarakat bahwa untuk meraih kemerdekaan Indonesia, diperlukan sebuah perjuangan kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa membedakan latar belakang mereka.

Sebelum adanya pemufakatan ini, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika gerakan politik yang lebih terfragmentasi. Berbagai organisasi yang berdiri seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengusir penjajahan, namun belum terjalin koordinasi yang solid di antara mereka. Pada masa itu, meskipun terdapat semangat persatuan, banyak perbedaan yang memisahkan berbagai gerakan ini, baik dalam hal strategi perjuangan maupun dalam cara pandang mereka terhadap kebijakan yang harus diambil dalam rangka mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, upaya untuk menggabungkan dan menyatukan berbagai kekuatan ini menjadi sangat krusial.

Pemufakatan yang dimaksudkan di sini tidak hanya sekedar menyatukan organisasi-organisasi yang ada, tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya sebuah pergerakan yang kompak dan terorganisir dengan baik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini membutuhkan keberanian untuk menyatukan berbagai pandangan yang berbeda dan menjadikan kepentingan bangsa sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, perhimpunan politik kebangsaan Indonesia pada masa itu bukan hanya sekedar upaya untuk mencapai kemerdekaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terpecah dalam menghadapi kolonialisme.

Pemufakatan yang dilakukan oleh berbagai perhimpunan politik ini menandakan adanya kesepahaman dalam visi dan misi untuk membentuk suatu bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Proses pemufakatan ini tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh penting di bidang politik, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki tujuan bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari penjajahan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pemufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia, dengan pembahasan mengenai sejarah berdirinya, tujuan di dirikannya, kontribusi masing-masing perhimpunan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyatuan berbagai perbedaan ideologi politik demi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Tinjauan Pustaka

Andriyanto. *“Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1933”*. (Klaten, Lakeisha : 2019). Buku ini mengkaji secara komprehensif berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia selama masa pergerakan nasional, dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan buku ini juga memberikan gambaran menyeluruh



tentang perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan dapat menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Dalam Artikel "Jejak Kaum Nasionalis di Bandung Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) Berdiri" karya Hafidz Azhar, yang mengulas pembentukan PPPKI sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan di antara berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Gagasan pendirian PPPKI muncul dari keinginan Sukarno untuk mencapai cita-cita persatuan Indonesia. Dalam Kongres Partai Sarekat Islam di Pekalongan, Sukarno membahas pentingnya federasi partai-partai politik dan membentuk komite yang mengundang berbagai organisasi untuk berkolaborasi. Pada pertemuan tersebut, organisasi seperti Partai Sarekat Islam, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia sepakat membentuk federasi bernama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Dalam buku "Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934" karya John Ingleson mengkaji dinamika pergerakan nasional Indonesia pada periode 1927 hingga 1934, dengan fokus pada organisasi-organisasi politik yang muncul setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926. Ingleson menyoroti bagaimana kesadaran politik di kalangan mahasiswa memicu pembentukan organisasi-organisasi baru yang progresif, bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menantang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Buku ini juga mengulas reaksi pemerintah kolonial terhadap perkembangan tersebut, termasuk penangkapan besar-besaran terhadap para pemimpin organisasi dan simpatisannya, yang seringkali berujung pada pengasingan tanpa proses hukum yang adil. Tokoh-tokoh nasionalis yang diasingkan inilah yang kemudian memainkan peran penting menjelang kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku "Sejarah" karya Nana Supriatna merupakan salah satu literatur yang membahas tentang sejarah dan metodologi pembelajarannya. Dalam buku ini, penulis menekankan pentingnya pendekatan kritis dalam pembelajaran sejarah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan siswa terhadap isu-isu sosial kontemporer. Serta memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pembelajaran sejarah yang kritis dan interaktif, dan mendorong siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara peristiwa sejarah dan kondisi sosial saat ini.

Dalam buku "Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" karya M. Mulki Noor membahas tentang pembentukan dan peran Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ada awalnya, PPPKI berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu dengan mengadakan aksi balasan, membentuk dana bantuan nasional, dan mengeluarkan program pengajaran nasional. Namun, dalam perkembangannya, terjadi perpecahan di antara anggota-anggota PPPKI akibat perbedaan pandangan dan kepentingan politik. Perpecahan ini menyebabkan menurunnya efektivitas PPPKI dalam mencapai tujuan awalnya. Buku ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik dan upaya persatuan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia pada periode tersebut.

Dalam skripsi berjudul "Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1927-1935" karya Novita Fitriasia membahas peran PPPKI dalam pergerakan nasional Indonesia serta sejauh mana ide dan semangat persatuan yang



dikembangkannya mempengaruhi pergerakan di Indonesia. PPPKI didirikan pada 17 Desember 1927 di Bandung oleh beberapa organisasi, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam (PSI), Budi Utomo, Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatera, dan Indonesische Studieclub. Tujuan utama pembentukan PPPKI adalah menggalang persatuan dan kerja sama di antara berbagai perhimpunan yang ada di tanah air serta menyamakan arah perjuangan demi mencapai kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku *Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933* karya Peter Kasenda (2010) membahas secara mendalam perkembangan intelektual dan politik Sukarno pada periode formatif dalam kehidupan dan kariernya. Dalam kajian ini, Kasenda mengeksplorasi bagaimana pemikiran dan ideologi politik Sukarno terbentuk sejak masa mudanya, khususnya dalam kurun waktu 1926 hingga 1933. Kasenda menyoroti bahwa Sukarno muda tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal di Technische Hoogeschool (sekarang ITB), tetapi juga oleh interaksinya dengan berbagai pemikir dan tokoh pergerakan nasional. Dalam buku ini, Kasenda menguraikan pengaruh besar dari HOS Tjokroaminoto, yang merupakan mentor politik bagi Sukarno, serta bagaimana Sukarno mengadopsi dan memadukan ide-ide nasionalisme, sosialisme, dan Marxisme dalam perjuangan politiknya.

Dalam buku *Perjuangan Politik di Indonesia, 1908–1945* karya Soemardjan (1962) merupakan salah satu karya penting yang membahas dinamika politik di Indonesia selama periode pergerakan nasional. Buku ini memberikan analisis mendalam mengenai perkembangan organisasi politik, peran tokoh-tokoh nasional, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soemardjan menguraikan perjalanan politik Indonesia sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai awal kebangkitan nasional hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Ia menyoroti bagaimana organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan lainnya memainkan peran dalam membentuk kesadaran politik rakyat Indonesia. Selain itu, ia juga mengkaji kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan dampaknya terhadap gerakan politik pribumi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam latar belakang berdirinya, tujuan didirikannya, dan berakhirnya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:

- a. Studi Kepustakaan : Penelitian ini disebut sebagai studi kepustakaan karena pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah mengenai PPPKI guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait organisasi ini, dan referensi lain yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut.



- b. Analisis Dokumen: Menelaah dokumen historis seperti pernyataan resmi, resolusi, notulen pertemuan PPPKI, dan korespondensi para tokohnya.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode historis yang terdiri dari beberapa tahapan berikut:

- a. Heuristik: Mengumpulkan dan menyeleksi sumber data yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Kritik Sumber: Melakukan evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas sumber sejarah dengan menerapkan kritik eksternal (keaslian sumber) dan kritik internal (kandungan isi sumber).
- c. Interpretasi: Menafsirkan makna dari dokumen dan data yang diperoleh dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi pada saat itu.
- d. Historiografi: Menyusun narasi sejarah berdasarkan fakta yang telah dikaji secara sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang.

PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya PPPKI

Sejak April 1927, Sukarno dan Sukirman mulai mempersiapkan dasar untuk pembentukan federasi partai-partai politik. Dalam kongres yang diadakan di Pekalongan, keduanya menyusun serta membagikan kepada peserta kongres mengenai rencana Anggaran Dasar (AD) untuk Sarekat Partij-partij Politiek Indonesia sebagai tema utama pembahasan. Nama Sarekat Partij-partij Politiek Indonesia diajukan sebagai nama untuk aliansi antarorganisasi tersebut. Beberapa pasal utama dalam Anggaran Dasar yang diusulkan menyatakan bahwa organisasi ini adalah sebuah federasi yang tidak akan mengatur partai-partai politik yang ada, akan terus beroperasi secara independen, dan akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan keputusan yang disetujui bersama secara aklamasi. (Ingleson, 1988)

Pada saat yang sama, kesadaran untuk menjalin kerjasama antarorganisasi pribumi sudah mulai berkembang pada tahun-tahun sebelumnya. Di Bandung, didirikan Indonesisch Eenheidscomite (Komite Persatuan Indonesia), sementara di Surabaya terbentuk Comite Persatuan Kebangsaan (Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia). Pembentukan Comite Persatuan Indonesia menjadi langkah awal untuk mewujudkan sebuah partai nasional. Pengurus komite ini berasal dari Algemeene Studieclub yang ada di Bandung, dengan Sartono sebagai ketua, Soeprodjo sebagai wakil ketua, Sukarno sebagai sekretaris, Sjahbudin Latif sebagai wakil sekretaris, dan bendahara dipegang oleh Mas Oesman (Menjadi Indonesia Buku I). Pada Agustus 1926, diadakan pertemuan terbuka yang dihadiri oleh berbagai perhimpunan. Acara tersebut berlangsung di Gedung Societeit Ons Genoegen (sekarang PPK/YPK) di Bandung dan dihadiri sekitar 1.000 orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mewakili berbagai organisasi.

Organisasi-organisasi yang hadir tersebut yakni, Algemeene Studieclub, Pengurus Besar Pasundan, Perserikatan Minahasa, Perdata Budi Utomo, Persatuan Islam, Pasundan Cabang Bandung, Partai Sarekat Islam, Persatuan Pemimpin Islam, Comite Oemat Islam Bandung,



Permoefakatan Islam, Comite Chilafat Bandung, Indonesia Studieclub Surabaya, dan perwakilan dari kelompok komunis. Pertemuan itu menghasilkan keputusan, dengan menimbang: “Persatoean itoe amat dirasakan dan dipandang perloe oleh seloeroeh rakjat Indonesia menimbang poela, jang persatoean itoe dapat ditjapai”. Dan memutuskan: “mengasi koeasa pada perhimpoean-perhimpoean terseboet di atas tadi, oentoek mengadjak segala perhimpoean-perhimpoean dan orang-orang lain diseloeroeh Indonesia berdaja oepaja boeat mentjapai persatoean itoe”

Menurut catatan A.K. Pringgodigdo, perkumpulan yang diberi nama Comite Persatoean Indonesia itu mengadakan kembali pertemuan penting pada bulan September 1926. Adapun beberapa organisasi yang ikut dalam pertemuan itu antara lain, seluruh Studieclub yang ada di Indonesia, Partai Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Islamiten Bond, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan Sarekat Madura. Di samping itu Comite Persatoean Indonesia juga mengadakan beberapa cabang komite di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung. Masing-masing cabang diketuai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo untuk daerah Jakarta, Soejoedi untuk Yogyakarta dan Mr. Sartono untuk cabang Bandung (Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia). Dengan terbentuknya Comite Persatoean Indonesia sebelumnya, rencana untuk membangun kembali federasi dari berbagai organisasi pribumi tidak menemui hambatan berarti di masa depan. Peran Sukarno dan Sukirman dalam merancang dasar-dasar federasi pada kongres di Pekalongan tampaknya mendapat sambutan positif dari beberapa perkumpulan. Pada 17-18 Desember 1927, di sebuah gedung sekolah Taman Siswa di Bandung, utusan dari berbagai organisasi berkumpul untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini, organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Soematrenen Bond, Kaoem Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia sepakat untuk membentuk sebuah federasi yang dinamakan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). (Azhar, 2023)

Maka dari itu Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang berbentuk federasi dan berasal dari gabungan berbagai partai politik. PPPKI didirikan dalam sebuah rapat di Sekolah Taman Siswa Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927. PPPKI merupakan organisasi partai-partai politik tanpa tuntutan ideologi, kecuali perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi pertama yang bergabung dalam PPPKI adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam (PSI), Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, *Indonesische Studieclub* (Kelompok Studi Indonesia) *Algemeene Studieclub*, dan Sarekat Sumatera dan Perhimpunan Kaum Betawi (Kasenda, 2010).

Meskipun PPPKI dibentuk di Bandung, federasi ini belum resmi hingga diadakan kongres khusus pada Juli 1928. Pada kongres tersebut, PPPKI diumumkan secara resmi. Panitia kongres dipimpin oleh Sabiran sebagai ketua, Soenarjo sebagai sekretaris, dan Dr. Samsi sebagai anggota. Meskipun PPPKI baru dianggap resmi pada tahun 1928, tahun berdirinya federasi ini tetap tercatat pada 1927. Tujuan utama PPPKI adalah untuk memperjuangkan persatuan dalam rangka mewujudkan politik nasional dengan dukungan dari berbagai organisasi yang terlibat.

Pada kongres yang diadakan pada 30 Agustus - 2 September 1928 di Surabaya, Soetomo terpilih sebagai ketua Majelis Pertimbangan, dengan Anwar sebagai sekretaris dan bendahara. Kongres ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto dari Partai Sarekat Islam, Sukarno dari PNI, Otto Subrata dari Pasundan, M. Thamrin dari Kaum Betawi, dan perwakilan lainnya.



Terpilihnya Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan menggeser pusat pergerakan dari Bandung ke Surabaya, tempat Soetomo memimpin gerakan ini.

Tujuan Berdirinya PPPKI

Tujuan PPPKI adalah untuk mencapai keselarasan tindakan di seluruh negeri, memperkuatnya dengan memperkuat organisasi dengan kerja sama antar-anggotanya, dan mencegah perselisihan. Oleh karena itu, masalah fundamental dan keyakinan partai yang bersatu tidak akan dibahas dalam konsentrasi itu (Pringgodigdo 1980: 74). Oleh karena itu, solidaritas, yang merupakan elemen penting dalam organisasi kebangsaan, dapat diterapkan. Kongres pertama PPKI diadakan di Surabaya dari tanggal 30 Agustus hingga 2 September 1928. Anggota PPPKI tidak boleh menyalahkan tujuan atau asas anggota lainnya, tidak boleh menggunakan kata-kata yang merugikan anggota lainnya, dan tidak boleh berpropaganda untuk organisasi sendiri. Kongres juga memutuskan bahwa segala perselisihan antara anggota PPPKI harus diselesaikan melalui perundingan (Andriyanto, 2019).

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dibentuk dengan tujuan utama untuk menyatukan kekuatan politik bangsa dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, berbagai perhimpunan politik, baik yang berbasis etnis, agama, atau ideologi tertentu, muncul dengan tujuan yang serupa, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan. Namun, perbedaan latar belakang ideologi dan tujuan awal antara perhimpunan-perhimpunan tersebut sering kali menyebabkan fragmentasi gerakan nasional. Oleh karena itu, pemufakatan ini diharapkan dapat mengatasi perpecahan tersebut dengan menjalin kerja sama yang lebih solid antarperhimpunan yang ada.

Tujuan lain dari pemufakatan ini adalah untuk memperkuat gerakan perjuangan kemerdekaan yang terorganisir dengan baik. Dengan menyatukan visi dan misi, perhimpunan politik kebangsaan dapat menghindari konflik internal yang mungkin terjadi akibat perbedaan pandangan dan lebih fokus pada satu tujuan besar, yaitu kemerdekaan. Dalam konteks ini, pemufakatan bukan hanya sebagai upaya untuk memperbesar kekuatan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Melalui pemufakatan ini, berbagai kelompok politik dapat saling mendukung dan mengharmoniskan langkah-langkah yang diambil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Noor, 2024).

Selain itu, pemufakatan ini juga bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya tujuan nasional yang satu, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan politik, pemufakatan ini diharapkan dapat menyatukan semua elemen bangsa dalam satu cita-cita bersama yang lebih besar dari perbedaan ideologi. Dengan demikian, proses pemufakatan tidak hanya berfokus pada pencapaian kemerdekaan, tetapi juga pada pembentukan identitas kebangsaan yang kuat. Hal ini sangat penting dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan di kalangan seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan landasan untuk kelangsungan negara yang merdeka dan berdaulat.

Tujuan dari pemufakatan ini juga mencakup pembentukan dasar ideologi yang kuat untuk Indonesia yang merdeka. Kerja sama antara perhimpunan-perhimpunan politik diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang mengarah pada pembentukan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Sebagai bagian dari gerakan



nasional, pemufakatan ini memiliki peran penting dalam merumuskan nilai-nilai yang akan menjadi dasar negara Indonesia, baik dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi negara maupun dalam sistem pemerintahan yang akan diterapkan setelah kemerdekaan tercapai. (Fitrisia, 1998) Secara keseluruhan, pemufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia memiliki tujuan yang sangat strategis dan mendalam, yaitu untuk mengatasi perbedaan politik yang ada, menyatukan semangat perjuangan, dan mewujudkan kemerdekaan serta pembentukan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Berakhirnya PPPKI

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah federasi organisasi politik yang didirikan pada 17 Desember 1927 oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan dr. Soekiman. Didirikannya PPPKI ini sebagai federasi yang menggabungkan berbagai organisasi politik nasionalis, seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia (PNI), Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Tujuan utama pembentukan PPPKI adalah untuk menyatukan kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini menghadapi berbagai tantangan yang mengarah pada perpecahan dan akhirnya pembubaran.

Upayanya untuk mempertahankan eksistensinya, PPPKI melakukan beberapa langkah perubahan. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah mengganti nama organisasi dari "Permufakatan" menjadi "Persatuan" dan mengganti kata "Kebangsaan" menjadi "Kemerdekaan". Nama baru ini diharapkan bisa mencerminkan semangat yang lebih kuat untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Majelis Pertimbangan juga dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta dengan tujuan untuk memperkuat posisi organisasi di pusat kekuasaan.

Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi. Pada 1933, PPPKI bahkan tidak mendapatkan izin untuk mengadakan kongres tahunan dari pemerintah kolonial Belanda, yang menandai awal kemunduran organisasi ini. Setelah itu, tidak ada lagi kegiatan besar yang dilakukan oleh PPPKI. Tanpa adanya kegiatan yang berarti dan semakin banyaknya perbedaan di dalam tubuh organisasi, PPPKI akhirnya bubar dengan sendirinya pada pertengahan 1930-an.

Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) berakhir karena berbagai faktor internal dan eksternal yang melemahkan federasi ini. Dari segi internal, terjadi perbedaan pendapat dan pandangan di antara anggota PPPKI mengenai arah dan tujuan organisasi tersebut. Beberapa anggota merasa bahwa PPPKI tidak lagi sesuai dengan aspirasi mereka untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, sementara yang lain menganggap bahwa pendekatan yang lebih moderat dan dialogis lebih efektif dalam menghadapi situasi politik pada waktu itu.

Selain itu, masalah kepemimpinan juga menjadi tantangan dalam PPPKI. Ketidaksetujuan antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi ini memperburuk keharmonisan dalam pengambilan keputusan dan strategi politik. Hal ini memicu ketegangan yang akhirnya memperlemah persatuan di dalam PPPKI. Dari segi eksternal, tekanan dari penjajah Belanda yang semakin intensif juga turut mempengaruhi berakhirnya PPPKI. Pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam dan berusaha melemahkan gerakan-gerakan perlawanan, termasuk PPPKI, melalui berbagai bentuk represi politik dan pembatasan terhadap aktivitas organisasi. Selain itu,



perkembangan politik di luar negeri, seperti perubahan situasi internasional dan kemajuan dalam pergerakan kemerdekaan di negara-negara lain, turut mempengaruhi dinamika organisasi ini. (SPADA Indonesia)

Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana PPPKI berakhir :

1. Faktor Internal

Perselisihan Ideologi dan Strategi

Sejak awal, PPPKI menghadapi perbedaan ideologi di antara anggotanya. Partai Sarekat Islam (PSI) memiliki pandangan nasionalis-Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI) bersifat nasionalis-sekuler, sementara Budi Utomo cenderung konservatif. Ketegangan ini menciptakan konflik internal yang sulit diselesaikan.

Keluarnya PSI

Pada Desember 1930, PSI memutuskan keluar dari PPPKI karena ketidakpuasan terhadap dominasi PNI dalam federasi. Langkah ini melemahkan persatuan yang menjadi dasar utama PPPKI.

Perpecahan dalam PNI

Penangkapan Sukarno pada tahun 1930 menyebabkan perpecahan dalam PNI menjadi dua kubu: Partindo (dipimpin oleh Sartono) dan PNI-Baru (dipimpin oleh Hatta dan Sjahrir). Polarisasi ini turut berdampak pada stabilitas PPPKI karena kedua kelompok memiliki strategi perjuangan yang berbeda.

2. Faktor Eksternal

Tekanan Pemerintah Kolonial

Pemerintah kolonial Belanda memperketat pengawasan terhadap organisasi pergerakan nasional, termasuk PPPKI. Reaksi keras berupa pembatasan kebebasan berorganisasi dan tindakan represif terhadap para pemimpin pergerakan membuat aktivitas PPPKI semakin sulit dilakukan.

Penurunan Aktivitas

Pada akhir 1930-an, aktivitas PPPKI menurun drastis. Federasi ini tidak lagi mampu mengadakan aksi-aksi signifikan atau kongres besar seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PPPKI secara perlahan kehilangan relevansi dan efektivitasnya sebagai wadah perjuangan politik.

Untuk mempertahankan eksistensinya, PPPKI sempat mencoba beberapa langkah, seperti mengganti nama dari "Permufakatan" menjadi "Persatuan" dan "Kebangsaan" menjadi "Kemerdekaan," serta memindahkan Majelis Pertimbangan dari Surabaya ke Jakarta. Namun, langkah-langkah ini tidak cukup untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi. Akhirnya, setelah sekitar empat tahun tanpa kegiatan berarti, PPPKI bubar dengan sendirinya pada sekitar 1935-an. Pada awalnya, PPPKI berhasil menjalankan perannya sebagai wadah yang menyatukan berbagai kalangan pergerakan, melalui aksi balasan, pembentukan dana bantuan nasional, dan pelaksanaan program pengajaran nasional. Namun, seiring waktu, terjadi



perpecahan di antara anggota-anggota PPPKI. Perbedaan-perbedaan yang semula dianggap sepele akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Akibatnya, PPPKI mengalami kemunduran dan sejak 1935, organisasi ini tidak lagi terdengar dalam dunia pergerakan Indonesia karena tidak mengadakan kegiatan apapun.

Meski PPPKI gagal sebagai wadah pemersatu, organisasi ini berhasil menanamkan paham persatuan di kalangan pergerakan, yang mencapai puncaknya dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Selain itu, PPPKI juga mendorong perhimpunan-perhimpunan lain untuk bekerja sama dan membentuk badan federasi atau fusi. Dengan cara ini, kalangan pergerakan Indonesia semakin solid dalam melawan penjajahan Belanda (Novita Fitrisa) .Sebagai gantinya, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) muncul pada tahun 1939 sebagai wadah baru yang lebih terorganisasi untuk menyatukan partai-partai politik di Indonesia.

KESIMPULAN

PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) dibentuk pada 17 Desember 1927 sebagai federasi yang menyatukan berbagai organisasi politik di Indonesia dengan tujuan utama memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Federasi ini menggabungkan partai-partai seperti PNI, PSI, Budi Utomo, dan lainnya, serta berusaha menciptakan persatuan di antara organisasi-organisasi yang memiliki perbedaan ideologi. Namun, PPPKI menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan kemundurannya. Faktor internal seperti perselisihan ideologi antar anggotanya, keluarnya PSI dari federasi, dan perpecahan dalam PNI mengganggu stabilitas organisasi. Di sisi eksternal, tekanan pemerintah kolonial Belanda yang semakin ketat juga memperburuk kondisi organisasi ini. Meski ada usaha untuk memperbaiki federasi, seperti mengganti nama dan memindahkan pusat pergerakan, upaya tersebut tidak cukup untuk mempertahankan eksistensinya.

Pada akhirnya, PPPKI bubar pada pertengahan 1930-an setelah sekitar empat tahun tidak ada kegiatan signifikan. Sebagai penggantinya, muncul Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada 1939, yang menjadi wadah baru bagi partai-partai politik untuk bersatu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keberadaan PPPKI, meskipun singkat, memberi pengaruh besar terhadap pengembangan gerakan politik di Indonesia dan menjadi cikal bakal organisasi-organisasi yang lebih terkoordinasi pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto. (2019). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1933*. Klaten : Lakeisha.
- Azhar, H. (2023). JEJAK KAUM NASIONALIS DI BANDUNG (16): Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) Berdiri. *Bandung Bergerak*.
- Fitrisia, N. (1998). Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1927-1935. *Universitas Indonesia Library*.
- Ingleson, J. (1988). *Jalan Ke Pengasingan : Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1935* . Jakarta : LP3ES.
- Kasenda, P. (2010). *Sukarno Muda : Biografi Pemikiran 1926-1933*. Depok: Komunitas Bambu.



Noor, M. M. (2024). Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Novita Fitrisa, N. N. (n.d.). Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia tahun 1927-1935. *Online Universitas Indonesia Library*
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20156761>.

SPADA Indonesia, L. (n.d.). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. SPADA Kemdikbud
https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/page/view.php?id=140111&utm_source=chatgpt.com.